

**REALITA PRINSIP DASAR PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN
NARAPIDANA WANITA YANG SEDANG HAMIL DAN PASCA MELAHIRKAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RICCO ANTAR BUDAYA

NIM. 0910110069



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

**REALITA PRINSIP DASAR PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN
NARAPIDANA WANITA YANG SEDANG HAMIL DAN PASCA MELAHIRKAN
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang)**

Ricco Antar Budaya

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: Ricco.zoom@gmail.com

ABSTRAK

Ricco Antar Budaya, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, Realita Prinsip Dasar Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil dan Pasca Melahirkan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang), Bambang Sudjito, SH.MH., Abdul Madjid, SH.MH.

Setiap masyarakat berhak memperoleh kesejahteraan dalam kehidupannya, tak terkecuali narapidana pada umumnya dan narapidana wanita yang sedang hamil dan pasca melahirkan khususnya. Namun dalam membina narapidana tersebut haruslah sesuai dengan prinsip dasar pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembinaannya, narapidana tersebut harus berbeda dengan narapidana lain, mengingat kondisi kesehatan dan juga ditinjau dari segi psikologis.

Kata Kunci: Narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan, prinsip dasar pemasyarakatan.

ABSTRACT

Ricco Antar Budaya, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, February 2013, Reality of the Basic Principles In Coaching Correctional Inmates Became Pregnant And Gave Birth (Study in Malang Woman Prison II A Class), Bambang Sudjito, SH.MH., Abdul Madjid, SH.MH.

Every community is entitled to happiness in life, not to mention prisoners in general and female prisoners who are pregnant and post-natal particular. But in fostering inmate must be in accordance with basic principles of correctional and regulations applicable rules. In supporting them, inmates must be different from the other inmates, given the health conditions and also in terms of psychological

Keywords: *Female prisoners who are pregnant and post-natal particular, the Basic Principles In Coaching Correctional*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini juga dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 (empat) bahwa negara bertujuan untuk mensejahterahkan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya

masyarakat yang bebas saja, namun juga termasuk masyarakat yang kemerdekaannya terampas akibat melakukan pelanggaran-pelanggaran atau melanggar hukum (narapidana).

Pada dasarnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, tak terkecuali bagi narapidana sekalipun meskipun ia telah melanggar hukum. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-hak narapidana sebagai warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum¹. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung atau diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara².

Dalam usahanya, negara mempunyai banyak rintangan dan halangan yang ditimbulkan antara lain oleh para pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukkan mereka (pelanggar hukum) sebagai terpidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan, tugas Negara belumlah selesai dan justru baru dimulai, karena terpidana pada suatu saat harus dilepas kembali dalam masyarakat sebagai warga yang menghormati hukum, sadar akan tanggung jawab dan berguna bagi masyarakat. Tercapai atau tidaknya tugas Negara ini tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha pembinaan terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab Negara. Usaha

1 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal 7

2 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 1995, Hal 45

pembinaan narapidana dapat memberi harapan akan berhasil bila memperhitungkan kebutuhan masyarakat dan individu dengan mengingat kepribadian bangsa Indonesia.

Sistem Kepenjaraan sebagai suatu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, yang diatur dalam Reglemen Penjara (Stb. 1917-709) sebagai pelaksanaan dari pasal 29 KUHP, sudah tidak sesuai dengan Pancasila, karena berasal dari pandangan individualism yang memandang dan memperlakukan narapidana tidak sebagai anggota masyarakat³. Secara politik juga tidak berhasil karena mengutamakan pelaksanaan pencabutan kebebasan narapidana dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi canggung serta kurang mampu untuk hidup dalam masyarakat yang akibatnya mudah tergelincir lagi dalam perbuatan melanggar hukum, maka sistem Kepenjaraan diganti dengan sistem Pemasyarakatan.

Hal ini sesuai dengan pokok-pokok pikiran Saharjo yang kemudian dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan. Pokok pikiran tersebut dikenal dengan 10 pokok pikiran Saharjo, yaitu⁴ :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan didik pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan social untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.

3 H.R.Soegondo,Sistem Pembinaan Napi, Insania Citra, Yogyakarta, 2006, hal 2

4 R.A.S Soema Di Pradja dan Romli Atmasamita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Biratirta, Jakarta, 1979, hal 13-15

5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan atas pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi diamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Sistem Pemasyarakatan adalah satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pembedaan.⁵ Dalam membina narapidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya serta kemasyarakatannya. Dalam penyelenggaraan pembinaan ini mengikut sertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan narapidana

⁵ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, 2006, Bandung, hal 103

dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidana yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar telah siap untuk hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

MASALAH

1. Bagaimana realita prinsip dasar pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana yang sedang hamil dan pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan ?
2. Apa saja kendala yang dialami dalam mewujudkan realita pembinaan narapidana yang sedang hamil dan pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan ?

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis-empiris*, yaitu penelitian terhadap keadaan nyata dan faktual yang ada dalam masyarakat atau pada lapangan.⁶ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-sosiologis*, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.⁷ Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang dengan pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang tempatnya dianggap memenuhi standar representative karena merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Jawa Timur dan dari hasil pra survei yang dilakukan mendapatkan data bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang terdapat 3 narapidana yang hamil. Jenis data primer adalah data yang diperoleh langsung

6 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15-16.

7 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 42.

dari responden⁸. Adapun data primer disini diperoleh dari narapidana hamil dan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang sebagai pembina dalam membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian ini.⁹ Adapun data sekunder disini berasal dari dokumen-dokumen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang serta data yang diperoleh dari data hasil penelitian, penulisan skripsi, melalui studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber dan pendapat-pendapat ahli hukum. Sumber Data adalah data Primer berasal dari penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dan mencari segala informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui metode wawancara dan pengamatan langsung antara Penulis dengan pembina Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, sedangkan sumber data sekunder berasal dari Penelitian Kepustakaan yaitu metode penelitian dan pengumpulan data melalui kepustakaan berdasarkan data-data yang diperoleh dari literatur, penelitian ilmiah, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan laporan yang diperoleh dari seluruh pejabat atau anggota Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang yang pernah menangani kasus narapidana hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang. Teknik pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan responden, sedangkan pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengutip, membaca, mengutip, membrowsing, menganalisa perundang-undangan, buku yang berkaitan dengan permasalahan baik melalui media cetak maupun elektronik dan akses internet. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat atau anggota Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang yang pernah menangani atau

8 Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 91.

9 Abdulkalir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

membina narapidana hamil dan paska melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang. Sampel dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pejabat yang berwenang dalam menerima laporan serta menangani atau membina narapidana hamil dan paska melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang dan dengan melakukan wawancara dengan beberapa narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang. Responden adalah penjawab (atas pertanyaan yang di ajukan untuk kepentingan penelitian). Responden dalam penelitian ini adalah: Kasie Binadik 1 orang, dokter di lapas 1 orang, tenaga kesehatan 1 orang dan narapidana hamil 3 orang. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (*Deskriptif Analysis*) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.¹⁰ Data yang terkumpul disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisa menggunakan deskriptif analitis yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan studi kepustakaan yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan realitas yang terjadi sesungguhnya, kemudian disimpulkan untuk dijadikan suatu landasan dalam memberikan saran-saran serta pendapat penulis.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang pada awalnya berada di tengah kota Malang tepatnya di Jalan Merdeka Timur Alun-Alun Malang. Lembaga Pemasyarakatan khusus Wanita Malang berubah nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Tanggal 26 Februari 1986 dan menempati gedung baru yang diresmikan

¹⁰ Burhan Ashshofa, Op.Cit, hal. 91.

oleh Kepala Kantor Wilayah pada tanggal 16 Maret 1987 yang berlokasi di Jalan Raya Kebonsari Sukun Malang dengan jarak 5 km dari pusat Kota Malang. Lembaga Pemasyarakatan ini berdiri diatas tanah seluas 13.780 m² dan luas bangunan 4107 m².

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang berkapasitas 164 orang. tempat untuk narapidana dan tahanan sendiri terdapat beberapa blok yag terdiri menjadi: blok I terdiri dari atas 4 kamar, blok II terdiri atas 8 kamar, blok III terdiri atas 6 kamar, blok IV terdiri atas 10 kamar, blok V terdiri atas 6 kamar.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dari struktur organisasi tersebut menjelaskan bahwa tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Subsie Bagian Tata Usaha
2. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)
3. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana
4. Kepala Administrasi Keamanan dan Ketertiban
5. Kepala Bidang Kegiatan Kerja

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang mempunyai pegawai sebanyak 61 orang. Data rekapitulasi pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang yang berkaitan dengan pendidikan terakhir yang hanya tamatan SD (Sekolah Dasar) tidak ada, tamatan SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama) terdapat 1 orang, tamatan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas) terdapat 23, tamatan SM (Sekolah Menengah) terdapat 2 orang, S1 terdapat 31 orang dan S2 terdapat 4 orang. Mengenai status pekerjaan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang disebutkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) terdapat 62 orang, sedangkan untuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan MPP (Masa Persiapan Pensiun) tidak ada. jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang adalah 390 orang + 7 bayi yang terdiri dari 367 narapidana dan 23 tahanan. Untuk narapidana yang sedang hamil sendiri terdapat 3 orang.

A. Realita Prinsip Dasar Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana yang Sedang Hamil dan Pasca Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kls. II A Malang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas lapas yang menangani pembinaan narapidana hamil dan melahirkan dan juga narapidana hamil dan melahirkan adalah bahwa pembinaan narapidana tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pembinaannya sendiri, narapidana yang hamil dan melahirkan sangatlah berbeda dengan narapidana yang sehat. Pihak lapas sendiri telah melakukan upaya medis agar kesehjateraan narapidana tersebut terpenuhi. Mulai dari awal masuk, keadaan hamil, proses melahirkan, hingga paska melahirkan.¹¹ Hak-hak narapidana tersebut juga telah terpenuhi baik fasilitas maupun juga dari segi penambahan asupan kalori.

Pihak lapas juga telah menyediakan sel atau blok-blok khusus bagi narapidana hamil tersebut dalam menjalani masa tahanannya dan juga bagi bayi-bayi mereka agar mereka tetap mendapatkan kesehjateraan mereka meskipun dalam masa penahanan.¹² Dalam sel atau blok-blok tersebut telah tersedia tempat tidur maupun juga selimut. Lapas juga menyediakan perlengkapan bayi bagi mereka.

Narapidana hamil dan melahirkan tersebut juga tetap harus melaksanakan pembinaan sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku. Namun dalam pembinaannya terdapat dispensasi-dispensasi mengingat kondisi mereka yang tidak memungkinkan, seperti pembinaan olahraga dan kerja bakti. Narapidana tersebut mendapatkan pembinaan yang penuh dalam hal pembinaan keagamaan, pendidikan, dan keterampilan. Pembinaan tersebut yaitu :

11 Iin Indarti (Dokter di Poliklinik LAPAS Wanita Kls. II Malang), wawancara, tanggal 25 November 2012.

12 Lilik Sulistiyowati (Kasie Binadik di LAPAS Wanita Kls. II A Malang), wawancara, tanggal 15 Oktober 2012.

1. Pembinaan Agama

Pembinaan agama adalah pembinaan agama yang meliputi pembinaan mental spiritual melalui pembinaan rohani baik secara umum maupun konseling (Islam, Nasrani, Hindu, Budha). Pembinaan agama ini didasarkan pada agama masing-masing narapidana. Sarana yang disediakan Lembaga Pemasyarakatan untuk kegiatan keagamaan terdapat Musholla dan Gereja.

Untuk pembinaan agama Islam biasanya mendatangkan Ustad setiap hari Senin, Selasa dan Rabu. Ustad akan memberikan ceramah-ceramah agama kepada seluruh narapidana dan terkadang Ustad juga dapat membantu memberikan konseling atau bimbingan terhadap narapidana.

Untuk pembinaan agama Nasrani biasanya ada kebaktian dan kunjungan sosial dari pihak-pihak Gereja seperti Gereja Katolik. Untuk pembinaan agama Hindu juga disediakan suatu tempat khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan apabila menjalankan hari raya Nyepi.¹³

Dengan diberikan pembinaan agama ini diharapkan narapidana menyadari dan menyesal atas perbuatannya yang salah dan dapat merubah sikap serta perilakunya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2. Pembinaan Pendidikan

Untuk menambah pengetahuan para narapidana, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang menyediakan ruang pendidikan dan ruang perpustakaan, sehingga para narapidana dapat membaca dan meminjamnya. Bagi narapidana yang putus sekolah dapat meneruskan sekolah dan jika sudah selesai bisa langsung mengikuti ujian persamaan di sekolah-sekolah umum yang sudah ditentukan, syarat untuk mengikuti

13 Lilik Sulistiyowati (Kasie Binadik di LAPAS Wanita Kls. II A Malang), wawancara, tanggal 15 Oktober 2012.

persamaan itu adalah atas rekomendasi dari Depdiknas dan tetap mendapatkan pengawasan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan.¹⁴

3. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan ini bersifat manual atau keterampilan tangan, contohnya seperti merajut, menjahit, breyen, bordir, payet, batik, tulis canting, batik tulis dari getah pelepah pisang, salon, sulam pita, merenda, monte, membuat penebah, membuat jepit rambut, membuat tutup gelas, membuat tas laptop. Bentuk pembinaan keterampilan yang diterapkan disesuaikan dengan bakat dan pendidikan masing-masing narapidana. Pembinaan keterampilan ini sebagai bekal narapidana untuk bisa hidup mandiri dengan biaya murah dan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat diterapkan di masyarakat.¹⁵

Hal ini telah sesuai dengan pembinaan yang berdasarkan prinsip dasar pemasyarakatan.

B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Oleh LAPAS Wanita Kls. II A Malang Dalam Mewujudkan Realita Pembinaan Narapidana yang Sedang Hamil dan Pasca Melahirkan

Dalam melaksanakan pembinaan maupun menangani narapidana yang hamil dan pasca melahirkan, LAPAS Wanita Kls. II A Malang pasti menemui kendala-kendala ataupun kesulitan. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Terbatasnya tenaga kerja di LAPAS Wanita Kls. II A Malang dalam menangani narapidana hamil dan melahirkan. Hanya terdapat 1 dokter dan 1 tenaga kesehatan. Dalam hal ini dokter yang menangani narapidana tersebut adalah dokter umum, bukan dokter kandungan, hal tersebut menyebabkan kurang maksimal dalam penanganan dan narapidana juga harus menjalani pemeriksaan di luar LAPAS ke Rumah Sakit. Tenaga kesehatan yang bekerja di LAPAS Wanita

14 Lilik Sulistiyowati (Kasie Binadik di LAPAS Wanita Kls. II A Malang), wawancara, tanggal 15 Oktober 2012.

15 Lilik Sulistiyowati (Kasie Binadik di LAPAS Wanita Kls. II A Malang), wawancara, tanggal 15 Oktober 2012.

Kls II A Malang adalah seorang laki-laki, hal ini menjadi kendala karena tak jarang narapidana yang menolak diperiksa oleh laki-laki ketika dokter yang menangani tidak berada di LAPAS.¹⁶

2. Petugas pengamanan yang minim atau terbatas sehingga jika ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang harus menginap di Rumah Sakit terpaksa ditunda.
3. Kurangnya vitamin atau obat-obatan yang tersedia di LAPAS. Pihak LAPAS memang menyediakan vitamin dan obat-obatan terhadap narapidana yang hamil dan melahirkan, namun sengatlah terbatas.¹⁷

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana wanita yang sedang hamil dan paska melahirkan, juga perawatan secara medis dan psikologis, pihak Lapas Wanita Kls II A Malang telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan. Tidak hanya itu, pihak Lapas juga telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain adalah UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
2. Dalam melaksanakan pembinaan yang berdasar dengan prinsip dasar pemasyarakatan, pihak Lapas Wanita Kls II A Malang mendapatkan berbagai macam kendala-kendala, yaitu terbatasnya tenaga kerja di Lapas yang hanya memiliki 1 dokter dan 1 tenaga kesehatan, petugas pengamanan yang minim atau terbatas sehingga jika ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang harus menginap di Rumah Sakit terpaksa ditunda, kurangnya obat-obatan dan vitamin yang tersedia di Lapas.

16 Lilik Sulistiyowati (Kasie Binadik di LAPAS Wanita Kls. II A Malang), wawancara, tanggal 15 Oktober 2012.

17 lin Indarti (Dokter di Poliklinik LAPAS Wanita Kls. II Malang), wawancara, tanggal 25 November 2012.

A. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Disarankan agar Pemerintah dapat menambah anggaran dana Lembaga Pemasyarakatan, agar dapat menambah jumlah obat-obatan dan vitamin yang diperlukan oleh narapidana wanita yang sedang hamil dan paska melahirkan.

2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang

Disarankan agar pihak Lapas menambah tenaga kerja khususnya tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tersebut seorang wanita, karena Lapas hanya memiliki 1 tenaga kesehatan yang juga laki-laki, dimana masih terdapat beberapa narapidana wanita yang masih belum mau diperiksa oleh tenaga kesehatan laki-laki ketika dokter tidak hadir atau berhalangan kerja di Lapas.

3. Bagi Masyarakat

Disarankan bagi masyarakat sendiri khususnya keluarga narapidana agar tetap peduli terhadap keluarganya yang berada di Lapas dan tidak menyerahkan semua keperluan terhadap pihak Lapas, karena bagaimanapun juga pihak keluarga masih mempunyai tanggung jawab terhadap kesehatan narapidana itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkalir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sunggono. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dwidja Priyanto,. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama
- H.R.Soegondo. 2006. *Sistem Pembinaan Napi*. Yogyakarta : Insania Citra.
- Maidin Gultom, SH., M.Hum. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang.
- R.A.S Soema Di Pradja dan Romli Atmasamita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta : Biratirta.